

**OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Rendhy Rafiqurrahman

NPP. 32.0554

Asdaf Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: rendhyrafirahman@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Adfin Rochmad Baidhowah, S.IP., M.PA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Trenggalek Regency is one of the areas with a non-optimal Public Information Disclosure Index. In 2023 the score obtained was only 23.71 with the main cause being a leak in the website server security system of the Trenggalek District Communication and Informatics Office. This score is very far from the target stated in the Strategic Plan of the Trenggalek Communication and Information Office, which is 80 - 96. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the optimization of public information disclosure through collaborative governance at the Communication and Information Technology Office of Trenggalek Regency, examine the obstacles that exist, and also examine the efforts that have been made to improve the quality of information disclosure in Trenggalek. **Method:** This research uses descriptive qualitative research methods. The theory used is the theory of Collaborative Governance by Ansell and Gash in 2018. Data collection techniques through observation, documentation, and interviews and data triangulation. The informants taken were 12 people. Implementation of data analysis used through data reduction, data presentation and also drawing conclusions and verification. **Result:** The findings at the research locus reveal that the concept of collaboration between the government, the community, and the private sector, both mass media and goods providers, is a program implemented by the Communication and Informatics Office of Trenggalek Regency in optimizing the quality of information disclosure. In the adaptive governance dimension, all indicators have been running well, both involvement and adaptation to rapid change. In the network management dimension, there is already coordination in an integrated platform between the government, the community, and the private sector. In the participatory engagement dimension, there is active participation from all lines of collaboration, besides that inclusiveness in decision making has also been carried out even though the portion of the community is more limited. In the collaborative capacity building dimension, there has been good capacity building for internal agencies and the community, for the private sector it has not been done because the private sector is considered to have sufficient expertise. In the outcome evaluation dimension, there has been a good impact on the community as evidenced by the ease of information services obtained. **Conclusion:** The implementation system of the program to improve the quality of information disclosure through collaborative governance has been running optimally but has not yet reached the expected target. This is evidenced by the increase in the value of information disclosure from 23.71 to 48.76 in 2024..

Keywords: *Information Disclosure, Optimization, Collaborative Governance.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu wilayah dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak optimal. Tahun 2023 skor yang didapat hanya 23,71 dengan penyebab utama berupa kebocoran sistem keamanan server *website* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Skor ini sangat jauh dari target yang tertuang dalam Renstra Dinas Kominfo Trenggalek yaitu 80 - 96. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui *collaborative governance* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, mengkaji hambatan yang ada, dan juga mengkaji upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Trenggalek. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash tahun 2018. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara serta dilakukan triangulasi data. Informan yang diambil sebanyak 12 orang. Pelaksanaan analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Temuan di lokus penelitian mengungkapkan bahwa konsep kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta baik media massa maupun penyedia barang menjadi sebuah program yang dilaksanakan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalkan kualitas keterbukaan informasi. Pada dimensi *adaptive governance* semua indikator sudah berjalan dengan baik baik keterlibatan dan adaptasi dengan perubahan yang cepat. Pada dimensi *network management* sudah terdapat koordinasi dalam platform terintegrasi antara pemerintah, Masyarakat, dan pihak swasta. Pada dimensi *participatory engagement* sudah terdapat partisipasi aktif dari semua lini kolaborasi, selain itu inklusivitas dalam pengambilan Keputusan juga sudah dilakukan meskipun porsi Masyarakat lebih terbatas. Pada dimensi *collaborative capacity building* sudah ada peningkatan kapasitas yang baik bagi internal dinas dan juga Masyarakat, untuk pihak swasta belum dilakukan karena pihak swasta dirasa memiliki keahlian yang cukup. Pada dimensi *outcome evaluation* sudah ada dampak yang bagus di Masyarakat dibuktikan dengan kemudahan layanan informasi yang didapatkan. **Kesimpulan:** sistem pelaksanaan program peningkatan kualitas keterbukaan informasi melalui *collaborative governance* sudah berjalan dengan optimal akan tetapi belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai keterbukaan informasi dari semula diangka 23,71 menjadi 48,76 di tahun 2024.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, Optimalisasi, *Collaborative Governance*.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan ketersediaan berbagai sumber daya, seperti pengetahuan atau materi komunikasi. Informasi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tampilan, baik yang tersedia atau dapat diakses maupun yang ditutupi (Dimpleby & Burton, 2003). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa setiap badan publik harus memberikan akses informasi publik yang akurat dan juga dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat luas. Adapun dalam kualifikasi penilaian keterbukaan informasi, terdapat 5 tingkatan kualitas keterbukaan informasi yaitu :

- 1 Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100 (A)
- 2 Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 (B)
- 3 Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 (C)

- 4 Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 (D)
- 5 Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9 (E)

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa keterbukaan ini menemui berbagai ancaman karena adanya berbagai kondisi tertentu fenomena ini timbul karena rasa takut bahwa transparansi mampu mengungkapkan kelemahan atau kesalahan dalam kinerja mereka (Worthy, 2010). Banyak lembaga pemerintah, terutama di daerah-daerah terpencil, kemungkinan besar mereka tidak memiliki sistem informasi yang canggih atau staf yang terlatih dalam mengelola informasi digital. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan atau ketidakakuratan dalam memberikan informasi publik. Berdasarkan informasi yang diambil dari *United Nations E-Government Survey 2022* Indonesia berada pada peringkat 77 dari 193. kondisi ini mengalami kenaikan peringkat dari survei yang dilakukan pada tahun 2020 sebelumnya yang berada pada posisi 88. Meskipun demikian implementasi keterbukaan informasi pada tingkat provinsi masih menghadapi tantangan signifikan, tahun 2020 hanya 40 % provinsi yang berhasil mencapai Indeks Keterbukaan Informasi Publik diatas nilai 60 atau dalam kualifikasi “Cukup informatif”. Ketersediaan sumber daya terutama dari kapasitas manusia yang kurang dalam melakukan kolaborasi untuk penentuan kebijakan menjadi salah satu hal yang menjadi fokus perhatian (Van Rooy, 2024).

Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur mencapai 73,84 pada tahun 2023, pada tahun sebelumnya skor IKIP sebesar 74,43, dan pada tahun 2021 skor IKIP di angka 71,37. Akan tetapi kondisi kualitas keterbukaan informasi Kabupaten Trenggalek justru mengalami penurunan. Permasalahan yang terjadi disebabkan karena kerentanan sistem keamanan server pada website resmi dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Sistem keamanan server dikatan sebagai komponen utama dalam menjaga data agar tetap dapat diakses dan diolah secara aman (Arman & Rachmat, 2020). Setidaknya sudah 3 kali dalam satu tahun terkena *hack* dari situs *judi online*. Selain itu penggunaan teknologi yang belum menyeluruh menjadi salah satu masalah terhambatnya arus informasi. Data 4 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan nilai yang sangat drastis terutama pada tahun 2023 yang hanya mencapai 23,71

Tabel 1

TAHUN	BADAN PUBLIK	SAQ		VISITASI		WAWANCARA		IKIP	KATEGORI
		100	60%	100	20%	100	20%		
2020	Kab. Trenggalek	71,16	42,7	50,0	10,0	0	0	52,7	D
2021	Kab. Trenggalek	98,68	59,21	73,63	14,73	0	0	73,94	C
2022	Kab. Trenggalek	79,05	47,43	0	0	0	0	47,43	D
2023	Kab. Trenggalek	48,1	16,03	0	0	0	0	23,71	E

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Dinas Kominfo Prov. Jawa Timur, 2023

Rendahnya nilai IKIP Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain menurunnya Self Assessment Questionnaire (SAQ) dimana hal ini adalah tingkat kelayakan sebuah sistem digital dalam mengelola database informasi publik (Budianti & Suliati, 2016). Turunnya skor SAQ ini salah satunya disebabkan karena website pengelola informasi publik tidak update secara berkala sehingga backup informasi menjadi tidak teratur selain itu juga disebabkan dari sarana dan prasarana yang tersedia tidak cukup mendukung dalam peningkatan nilai IKIP. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah yang tidak terjalin dengan baik mengakibatkan layanan informasi publik juga menurun. Menurut Meijer

et al. (2012) pengolahan keterbukaan informasi publik akan memiliki koneksi yang baik antara visi pemerintah dan juga aspirasi Masyarakat ketika kedua aktor ini mampu bekerja secara adaptif dan kolaboratif.

Sebagai sektor yang berperan penting dalam pengelolaan informasi publik di tingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Trenggalek memiliki peranan yang strategis dalam menerapkan serta memaksimalkan keterbukaan informasi kepada publik melalui sistem kolaborasi aktif antar aktor. Pendekatan kolaborasi muncul sebagai solusi dalam menghadapi kompleksitas masalah publik, termasuk juga dalam hal transparansi informasi. Pendekatan ini menekankan adanya kolaborasi di antara berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Doberstein, 2016). Berkaca dari skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang telah dipaparkan di atas, kondisi keterbukaan informasi di Kabupaten Trenggalek mendapatkan skor yang belum maksimal sehingga dilakukan Langkah kolaboratif demi menjawab tantangan atas pengoptimalan angka keterbukaan informasi publik di lingkup Kabupaten Trenggalek.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tidak optimalnya kualitas keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator bahwa daerah tertentu belum mampu mencapai pemerintahan yang baik atau *good governance* (Wibawa, 2019). Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri mengalami kendala dalam penyelesaian masalah tidak optimalnya keterbukaan informasi. Sudah banyak cara dilakukan baik dari segi rapat dengan unsur pimpinan Lembaga pemerintahan di trenggalek, meminta desa desa untuk aktif mengisi berita dan informasi pada *website* desa, dan juga menambah anggaran untuk studi banding di wilayah lain. Akan tetapi belum ada observasi yang melihat sistem collaborative governance sebagai Langkah untuk mengatasi masalah ini.

Studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada implementasi collaborative governance dalam konteks pembuatan kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, atau pembangunan infrastruktur, namun belum secara komprehensif mengeksplorasi potensinya dalam optimalisasi keterbukaan informasi. Kesenjangan ini menjadi semakin mencolok mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah, khususnya di tingkat daerah, dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akses informasi yang lebih luas (Febriananingsih, 2012). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik, menghadapi berbagai kendala mulai dari keterbatasan sumber daya hingga dinamika regulasi yang terus berubah.

Analisis pelaksanaan kolaborasi didasarkan pada sebuah teori. Pada analisis terdahulu teori kolaborasi yang dipakai cenderung kaku dan sangat prosedural sehingga kreatifitas pengembangan aktor kolaborasi menjadi terhambat. fleksibilitas komunikasi dan koordinasi yang ditawarkan oleh teori ini berpotensi besar untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dan prosedural yang sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi. Dengan demikian, penggunaan teori collaborative governance Ansell dan Gash (2018) menjadi penting karena menawarkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan kontemporer dalam pengelolaan informasi publik.

Kerjasama antara pemerintah dengan Masyarakat sudah terjalin sejak lama di Kabupaten Trenggalek dalam beberapa hal. Akan tetapi kerjasama tersebut cenderung tidak mengarah pada urusan penentuan kebijakan. Sehingga hal tersebut menjadi kesenjangan yang harus diubah, bahwa Masyarakat juga bisa berperan aktif dalam penentuan kebijakan (Rahimallah & Ricky, 2023). Selain itu sektor swasta juga dapat berperan demikian sebagai

mitra kolaborasi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, baik yang membahas mengenai keterbukaan informasi maupun pada konsep *collaborative governance*. Jurnal ilmiah karya Diah Fatma Sjoraida pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan temuan berupa implementasi dari kebijakan Keterbukaan informasi publik (Sjoraida, 2015). Disebutkan juga bahwa Masyarakat Jawa Barat tidak puas atas pelayanan informasi publik sehingga penelitian ini berfokus pada penemuan faktor – faktor lemahnya implementasi. Artikel karya Muhammad Rizqi Rahmani pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil terdapat 4 dinas yang dibandingkan, akan tetapi keempat dinas ini masih belum optimal keterbukaan informasi publiknya dilihat dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Rahmani, 2021). Artikel karya Ida Ayu Githa Girindra, dkk dengan judul Optimalisasi Website Pemerintah Daerah Berbasis Collaborative Governance (Studi Pada Dinas Kota Malang) dengan hasil penelitian difokuskan pada Dinas Perdagangan yang masih pada fase emerging atau sebatas memiliki website sebagai situs resmi (Githa Girindra et al., 2021). Karya dari Ahmad Musthofa, dkk dengan judul Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dengan hasil optimalisasi Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo sudah cukup baik akan tetapi masih perlu di optimalkan mengingat terdapat beberapa beberapa faktor penghambat yang ditemukan (Musthofa et al., 2024). Karya dari Ratu Ulfah Zakiah, dkk dengan judul Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan Kota Bogor (ASINAN BOGOR) dengan hasil Pemerintah Kota Bogor bertindak sebagai pemegang kebijakan, PT Cartenz selaku pihak swasta bertindak sebagai penyedia alternatif teknologi, dan Masyarakat sebagai pengguna dan pemberi masukan (Zakiah et al., 2024).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dihasilkan kali ini memiliki keunikan sendiri dan juga merupakan hal baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kebaruan ini dapat terlihat dari karakteristik lokus yang belum pernah di analisis untuk hal *collaborative governance* dengan fokus pada pengoptimalan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini juga melibatkan Masyarakat dan pihak swasta sebagai aktor yang memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan dimana hal ini belum dilakukan pada penelitian terdahulu. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana sistem koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan pihak swasta dapat dilakukan melalui platform digital, karena hal ini selaras dengan kebaruan teori yang digunakan yaitu konsep teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash tahun 2018 mengenai *collaborative platform* (Ansell & Gash, 2018).

1.5 Tujuan

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam artikel ini bertujuan untuk menelaah dan mengetahui bagaimana proses optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui konsep *collaborative governance* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Trenggalek, mengetahui apa saja hambatan yang terjadi serta melihat upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas keterbukaan publik Kabupaten Trenggalek.

II. METODE

Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipandang sebagai metode yang memiliki sifat fleksibel dalam meneliti, karena memungkinkan adanya perubahan guna memperoleh keselarasan dengan rencana yang telah dibuat pada lokus penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2017). Pendekatan kualitatif juga berpedoman pada banyak jenis data bukan pada satu sumber data saja (Creswell & Angeles, 2011). Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara pada informan yang telah ditentukan. Informan diambil dari internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, pihak swasta, dan Masyarakat, ini dilakukan agar proses kolaborasi dapat terlihat. Adapun informan kunci adalah informan yang memiliki pengetahuan yang bersifat radikal terhadap suatu permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2023) dalam hal ini informan kuncinya adalah Kepala Dinas dan juga Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dilakukan selama 19 hari terhitung tanggal 6 – 25 Januari 2025 berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Suruh, Kecamatan Durenan dan di beberapa titik di Kabupaten Trenggalek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menelaah tentang optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui konsep collaborative governance oleh Ansell dan Gash tahun 2018 dengan melihat lima dimensi yang perlu dipertimbangkan yaitu *adaptive governance*, *network management*, *participatory engagement*, *collaborative capacity building*, dan *outcome evaluation* (Ansell & Gash, 2018) dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Adaptive Governance

Dimensi *adaptive governance* dapat dianalisis melalui dua indikator, indikator pertama yaitu fleksibel dalam pengambilan Keputusan dimana Masyarakat melalui KIM dilibatkan secara langsung dalam pengambilan Keputusan. KIM juga berjasa dalam mengelola sistem informasi desa berupa *Smart Desa* yang merupakan aplikasi terintegrasi untuk menyebarkan informasi terkait desa. Kabupaten Trenggalek saat ini memiliki 7 lokus KIM yang tersebar di beberapa Kecamatan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek juga menegaskan bahwa saat ini sudah terbentuk 7 KIM melalui surat keterangan dan bahkan terdapat beberapa KIM yang sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2

No.	NAMA	DESA/KELURAHAN	TANGGAL SK	KETERANGAN
1.	KIM Sumber Rejeki	Desa Tasikmadu	12 April 2016	Terdaftar di Kementerian Kominfo
2.	KIM Durensari	Desa Sawahan	4 Maret 2019	Terdaftar di Kementerian Kominfo
3.	KIM Matahati	Desa Sumbergayam	7 Januari 2019	Terdaftar di Kementerian Kominfo

4.	KIM Pijar	Desa Suruh	30 Juli 2019	Terdaftar di Kementerian Kominfo
5.	KIM Surgawi	Desa Widoro	15 Juli 2019	SK
6.	KIM Bima Sakti	Desa Karanganyar	3 Januari 2020	SK
7.	KIM Bambu Jaya	Desa Sengon	23 Februari 2020	SK

Sumber : <https://kominfo.trenggalekkab.go.id/>

Dimensi kedua berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Dimana pada dimensi ini mengungkapkan bahwa secara khusus dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek menjalin kolaborasi dengan CV Hanan Kana Sembada yang merupakan pihak ketiga. Pihak ini berperan dalam menyediakan aplikasi tambahan berupa *Firewall website* yang digunakan sebagai sistem keamanan khusus agar website yang dikelola aman dari hacker yang menyerang. Menurut pernyataan dari Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik bahwa pada tahun 2024 *firewall website* ini mampu bekerja dengan baik dan setidaknya telah meredam serangan virus dan aktivitas hack sebanyak 13,1 juta titik. Hal ini juga sebagai Langkah yang efektif untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang sangat cepat meskipun belum semua personal dinas mampu beradaptasi secara baik untuk keseluruhan.

3.2 *Network Management*

Dimensi *network management* dianalisis melalui dua indikator, pertama yaitu kualitas hubungan dan komunikasi dalam jaringan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pemerintah dalam hal ini pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menjalin komunikasi yang baik dengan Masyarakat terbukti dari kegiatan monitoring KIM secara rutin baik KIM desa maupun dalam rangka pembentukan KIM Pesantren. Selain itu komunikasi juga terjalin baik dengan pihak swasta dalam hal ini adalah dengan pihak media massa pada saat diskusi membahas tentang publikasi berita dan informasi Kabupaten Trenggalek. Selain itu juga terdapat inovasi yang dikembangkan oleh dinas Komunikasi dan Informatika Trenggalek dalam menciptakan sebuah sistem komunikasi yang efektif adalah dengan membentuk *smart center* Selain itu juga terdapat website smart center yang memiliki berbagai layanan seperti LAPOR (Layanan Online Pengaduan Masyarakat), PETUNGDADI, Survei Kepuasan Masyarakat, Layanan Trenggalek Satu Data, dan lain-lain.

Pada dimensi kedua yaitu keefektifan koordinasi antar aktor diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menunjukkan adanya sistem koordinasi yang bersifat hierarkis. Bentuk koordinasi yang baik juga tergambar pada pengelolaan media sosial dan juga pengelolaan website masing – masing dinas yang ada di Trenggalek. Setiap awal tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek akan mengirimkan disposisi permintaan atas data data yang harus diunggah oleh seluruh Dinas di Kabupaten Trenggalek pada akun Instagram dan juga pada website Satu Data Trenggalek. Selanjutnya di akhir tahun, Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan Nota Dinas yang dilaporkan kepada Bupati. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 300.2.12.2/ 964 /406.020/2024 menyebutkan bahwa dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Trenggalek terdapat 36 OPD yang telah mengunggah kinerja program/kegiatan pada platform media sosial Instagram, serta terdapat 5 OPD yang belum/tidak mengunggah laporan program kegiatan.

3.3 *Participatory Engagement*

Dimensi *participatory engagement* dianalisis melalui dua indikator, indikator pertama adalah

tingkat partisipasi para pemangku kepentingan. Hasil temuan pada indikator ini menunjukkan bahwa sudah terlihat adanya partisipasi dari Masyarakat dan juga pihak swasta. Untuk sektor Masyarakat, mereka dilibatkan secara langsung dalam mengelola dan menyebarkan informasi kepada Masyarakat lain. Hal ini bertujuan agar Masyarakat dapat dijadikan sebagai mitra dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Kemitraan ini direalisasikan dalam bentuk komunitas berupa KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) dimana setiap tahunnya dilakukan peningkatan kapasitas partisipasi dengan diadakan bimbingan teknis, workshop, maupun pelatihan lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk merealisasikan mandat yang tertera pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial menyatakan bahwa tiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota dihimbau untuk menetapkan mitra kerja diluar lingkup pemerintah guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Selain bersama masyarakat dalam pelaksanaan observasi juga melihat proses kolaborasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dengan pihak swasta. Proses kolaborasi bersama pihak swasta ini sekaligus menjadikannya sebagai konsultan keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini pihak swasta yang menjalin kolaborasi secara aktif adalah CV Hanan Kana Sembada.

Indikator kedua pada dimensi ini menelaah tentang inklusivitas dalam pengambilan Keputusan. Inklusivitas dapat dikatakan sebagai keterlibatan secara merata dari segala sektor tanpa adanya diskriminasi (Kartiwi et al., 2022). Hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek juga berkomitmen dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkup wilayah kerja Kabupaten Trenggalek untuk memberikan kesempatan dalam pengambilan Keputusan secara merata tanpa ada yang dikerdilkan. Komitmen ini dibuktikan dengan terbentuknya Tim pengelola website PPID Kabupaten Trenggalek. Tim ini terdiri dari komponen pemerintah termasuk pemerintahan desa yang melibatkan Masyarakat, pihak swasta, dan juga RSUD. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengunggahan informasi publik masing – masing badan publik melalui website resmi PPID Kabupaten Trenggalek. Adapun komposisinya secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 3

Jabatan Dalam Tim	Jumlah Personel	Keterangan
Koordinator Selaku Ketua PPID Utama	1	Kepala Bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dinas Kominfo
Anggota	45	Terdiri dari masing masing 1 anggota perwakilan OPD, 1 staf pembukuan, 1 Pihak Swasta, 2 perwakilan RSUD

Sumber : SK Bupati Trenggalek No. 100.3.3.2/378/406.001.3/2024

Dalam hal ini Masyarakat dan sektor swasta bersama dengan pemerintah sudah dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan atau penentuan kebijakan. Akan tetapi secara keseimbangan masih belum merata. Dimana kapasitas Masyarakat dalam hal ini lebih sedikit daripada sektor swasta, hal ini diakibatkan karena kapasitas Masyarakat yang mayoritas masih perlu ditingkatkan sedangkan pihak swasta secara umum telah memiliki keahlian dibidangnya. Terlihat pada table diatas Masyarakat tidak secara mandiri dilibatkan akan tetapi diikutsertakan dalam susunan komponen pemerintahan desa melalui KIM. Hal ini membuktikan kurang begitu maksimalnya keterlibatan ini.

3.4 Collaborative Capacity Building

Dimensi *collaborative capacity building* dapat dianalisis melalui dua dimensi. Pertama adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas aktor kolaborasi. Hasil observasi menyebutkan bahwa ditemukan adanya kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dan juga untuk Masyarakat yang tergabung dalam KIM. Pada lingkup KIM desa dilakukan bimtek yang mengarah pada peningkatan softskill seluruh personal di KIM. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Smart Center dengan pokok pembahasan berisikan peningkatan kapasitas seluruh KIM yang ada di kabupaten Trenggalek. Bimtek diisi dengan pemberian materi berupa cara penggunaan website desa, pelatihan canva sebagai sarana membuat infografis yang menarik, pemanfaatan platform tiktok dan Instagram untuk sarana promosi produk yang mungkin dibuat, dan sebagainya. Selain dilingkup Masyarakat peningkatan kapasitas tenaga kerja di lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika juga dilakukan secara rutin minimal 2 kali dalam satu tahun. Selain itu di tahun 2024 juga dilaksanakan Bimtek untuk Pengelola atau admin media sosial OPD se-Kabupaten Trenggalek. Bimtek yang dilakukan adalah Bimtek pemanfaatan Canva untuk media pemerintah.

Pada indikator kedua dipaparkan mengenai ketersediaan sumberdaya pendukung kolaborasi. Saat ini Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Trenggalek memiliki sumber daya yang memadai dari segi sarana dan prasarana tetapi masih belum optimal dari segi sumber daya manusia. Pada sarana kantor saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek memiliki 3 lokasi Gedung, yaitu gedung utama, gedung RPPL (Radio Penyiaran Publik Lokal), dan gedung smart center yang berlokasi di dalam lingkup pendopo. Untuk sumber daya manusia pendukung kolaborasi dapat terlihat dari rincian berikut ini :

Tabel 4

Unit Kerja	ABK	PNS	CPNS	PPPK	TPK
Kepala Dinas	1	1			
Sekretariat	20	11	-	-	4
Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	14	10	-	2	9
Bidang Aplikasi Dan Informatika	23	10	-	4	4
Bidang Statistik Dan Persandian	18	7	-	2	2
Jabatan Fungsional	8	-	-	-	-
Jumlah	84	39	-	8	9

Sumber : LKJIP Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Pada tabel diatas terlihat bahwa di beberapa bidang masih belum cukup dari segi jumlah personal atau dalam kata lain belum sesuai dengan Angka Beban Kerja (ABK). Hal ini lah yang menjadi kendala dalam melaksanakan suatu program yang terkadang menghambat lama pengerjaan kegiatan. Menurut pernyataan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek menyatakan bahwa internal dinas Kominfo untuk saat ini masih belum cukup optimal dilihat dari sumber daya manusianya. Hal ini karena kurangnya jumlah personal dan juga keterbatasan kemampuan manusia dalam menangkap ilmu pada kegiatan *capacity building*, dimana tidak semua personal mampu memahai dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber.

3.5 Outcome Evaluation

Dimensi *Outcome Evaluation* dapat ditinjau melalui indikator - indikatornya. Pertama dilihat dari segi peningkatan kualitas keterbukaan informasi public, hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa berbagai kemudahan mulai dirasakan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh publik. Sejak tahun 2023 publik mendapatkan akses penuh dari website PPID Kabupaten Trenggalek, Trenggalek Satu Data, platform sosial media yaitu Instagram, tiktok, facebook, twitter, dan juga youtube. Ini merupakan bentuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. Peningkatan ini mulai dirasakan Ketika pemerintah mulai membuka diri untuk berani menjalin mitra kolaborasi secara horizontal bersama masyarakat dan pihak swasta (Schneider et al., 2024). Selain itu pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek juga melakukan penyesuaian anggaran pada tahun 2024 dengan memangkas dan menambah pada aspek aspek tertentu dibanding tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5

Kegiatan/Aspek	Alokasi Anggaran Per-Tahun	
	2023	2024
Pengembangan dan pemeliharaan website resmi	Rp 150.765.300	Rp 332.562.500
Pengadaan server dan infrastruktur TI	Rp 350.234.600	Rp 483.725.300
Pengembangan aplikasi mobile keterbukaan informasi	Rp 200.876.250	Rp 274.347.600
Pelatihan staf untuk manajemen informasi publik	Rp 130.523.700	Rp 147.836.750
Sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat	Rp 235.678.900	Rp 188.453.200
Perjalanan dinas	Rp 157.654.300	Rp 45.678.900
Biaya konsumsi (makan dan minum)	Rp 86.543.200	Rp 28.765.400
Biaya rapat koordinasi	Rp 106.459.834	Rp 40.555.700

Sumber : Diolah Penulis dari RKA-SKPD dan LKJIP 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada aspek tertentu seperti pengembangan dan pemeliharaan website mengalami penambahan anggaran, begitu juga dengan pengadaan server, pengembangan aplikasi mobile keterbukaan informasi seperti SP4N LAPOR, PETUNGDADI, dan aplikasi *smartdesa*. Terdapat juga sedikit penyesuaian pada sosialisasi kepada Masyarakat, dan terjadi pemangkasan besar pada perjalanan dinas biaya konsumsi dan biaya rapat koordinasi.

Pada indikator kedua adalah terkait bagaimana dampak kolaborasi kepada masyarakat. Hasil temuan dilapangan mengungkapkan bahwa Masyarakat banyak terbantu oleh layanan pemerintah terutama pada layanan pelaporan dan pelayanan. Adapun bidang pelaporan Masyarakat bisa secara bebas melapor kepada pemerintah melalui laman resmi website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek tepatnya melalui contact person yang akan merespon dengan batas maksimal 1x24 jam terkait permintaan informasi yang diperlukan Masyarakat. Adanya kolaborasi antara pihak pemerintah dengan Masyarakat dan swasta juga memberikan dampak yang signifikan bagi ASN di lingkungan kerja Kabupaten Trenggalek, perbaikan sistem keamanan data dan juga server menjadikan pemerintah dapat mengakses informasi yang diperlukan langsung dari website PPID dengan mudah, selain itu kolaborasi ini juga menghasilkan inovasi berupa layanan Trenggalek Satu Data yang memuat informasi secara menyeluruh dari berbagai dinas maupun badan yang ada

di lingkup Kabupaten Trenggalek yang tentunya bermanfaat untuk lembaga pemerintah dan juga Masyarakat sendiri.

Dari berbagai kemudahan ini survei kepuasan Masyarakat terbukti meningkat dan mencapai kategori sangat baik dengan nilai 100 pada 187 responden hingga tanggal 3 Maret 2025. Hal ini menandakan bahwa Masyarakat puas atas pelayanan digital terutama dari segi perolehan informasi dan kemudahan permintaan informasi. Hasil dari kolaborasi yang dilakukan membuat website resmi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek dapat terintegrasi satu sama lain sehingga Masyarakat dapat lebih mudah dalam mencari data yang dibutuhkan. Pernyataan ini dibenarkan oleh salah satu anggota kepolisian Kabupaten Trenggalek yang mengungkapkan bahwa pihak kepolisianpun merasa dimudahkan dengan adanya layanan Satu Data Trenggalek.

Dari upaya tersebut hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi informasi Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 10/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2024 Kabupaten Trenggalek berada pada posisi 26 dari 38 Badan Publik yang dinilai dengan perolehan nilai 48,76. Adapun secara rinci perkembangan keterbukaan informasi di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

Tabel 6

TAHUN	BADAN PUBLIK	SAQ		VISITASI		WAWANCARA		IKIP	KATEGORI
		100	60%	100	20%	100	20%		
2020	Kab. Trenggalek	71,16	42,7	50,0	10,0	0	0	52,7	D
2021	Kab. Trenggalek	98,68	59,21	73,63	14,73	0	0	73,94	C
2022	Kab. Trenggalek	79,05	47,43	0	0	0	0	47,43	D
2023	Kab. Trenggalek	48,1	16,03	0	0	0	0	23,71	E
2024	Kab. Trenggalek	64,60	38,76	0	0	0	0	48,76	D

Sumber : Diolah penulis Tahun 2025

Sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa nilai tersebut sebenarnya masih jauh dari target yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 2021 – 2026, dimana target yang ditetapkan dalam renstra pada tahun 2024 seharusnya keterbukaan informasi sudah menyentuh kategori informatif atau pada rentan nilai 80 – 96 tapi kenyataannya nilai yang dicapai masih pada angka 48,76 dan masuk dalam kategori kurang informatif. Meskipun demikian, terdapat peningkatan nilai dibanding tahun 2022 dan 2023 dan masalah utama dari terpuruknya nilai IKIP Kabupaten Trenggalek sudah terselesaikan yaitu teratasinya peretasan website oleh situs judi online/slot.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian dengan tema besar melihat bagaimana kualitas keterbukaan informasi publik dilihat dari segi *collaborative governance* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek ini secara garis besar kualitas keterbukaan informasi di lingkup Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan berkat adanya kolaborasi antara pemerintah dengan mitra Masyarakat dan juga pihak swasta. Pelaksanaan kolaborasi ini merujuk pada kewenangan daerah untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara lebih fleksibel berkat adanya desentralisasi (Baidhowah, 2022). Hal ini sesuai mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Temuan utama pada penelitian ini yaitu pelibatan Masyarakat melalui kelompok KIM

atau Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Trenggalek, pelibatan ini tidak hanya sekedar sebagai mitra pendukung akan tetapi sebagai mitra utama yang juga mampu merumuskan dan memiliki peran penting dalam penentuan arah kebijakan khususnya dalam hal pengoptimalan kualitas keterbukaan informasi Publik. Temuan ini memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Wijaya mengenai pelibatan KIM dalam mengelola *website* desa demi tercapainya layanan *website* informasi desa yang optimal (Wijaya et al., 2022). Akan tetapi lingkup dari keterlibatan KIM ini sebatas pada lingkup desa saja tanpa adanya perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek memberikan perhatian khusus kepada kelompok KIM untuk menjadi mitra kolaborasi dalam peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

Temuan lain yang juga penting bersumber dari permasalahan yang dihadapi dan bagaimana respon dari pemerintah. Dimana masalah utama yang juga termasuk unik adalah berkaitan dengan peretasan sistem keamanan *website* yang terjadi dalam kurun waktu 2022 – 2023 dimana pada tahun tersebut kualitas keterbukaan informasi publik Kabupaten Trenggalek sangatlah buruk. Sehingga pemerintah merespon dengan proses kolaborasi dengan pihak eksternal yaitu dengan menggandeng pihak ketiga yaitu CV Hanan Kana Sembada dengan proses kolaborasi berupa penyediaan aplikasi tambahan berupa *firewall website* untuk mengatasi peretasan atau hack dari luar termasuk dari situs judi online dan slot. Hal ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah dimana pemerintah Kota Bogor juga melaksanakan kolaborasi dengan Masyarakat dan juga pihak ketiga yaitu PT Cartenz dalam mengelola layanan instan Kota Bogor (Zakiah et al., 2024). Perbedaan yang terlihat dalam hal ini berkaitan dengan cakupan kolaborasi, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih bersifat menyeluruh karena pengurusannya mencakup banyak website seperti website resmi dinas, Satu Data Trenggalek, Smartdesa, dan SP4N LAPOR.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam hal ini penulis juga menemukan beberapa hal yang menjadi penghambat proses kolaborasi dalam meningkatkan kualitas keterbukaan publik Kabupaten Trenggalek. Penghambat tersebut muncul dari sektor Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Teknologi, lemahnya koordinasi antar Lembaga yang belum ada kejelasan pembagian tugas terkait penyediaan informasi yang diperlukan, dan juga partisipasi Masyarakat yang masih belum maksimal. Selain itu penulis juga menemukan beberapa Tindakan yang sudah dilakukan pemerintah melalui dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek seperti variasi bimtek dan peningkatan kapasitas stakeholder, Kerjasama dengan pihak ketiga, pelaksanaan sistem informasi terpadu, dan juga pelaksanaan desa transparan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian terkait optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui *collaborative governace* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menunjukkan adanya peningkatan kualitas keterbukaan informasi, hal ini terbukti dengan meningkatnya nilai IKIP di tahun 2024 yaitu sebesar dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Analisis melalui konsep *collaborative governace* oleh Ansell dan Gash tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan pada tiap tiap dimensinya. Meskipun masih terdapat kekurangan pada beberapa poin seperti belum maksimalnya sumber daya manusia dan teknologinya terutama yang berada pada tingkat desa, belum maksimalnya koordinasi terkait

pembagian tugas Lembaga pemerintah dalam penyediaan informasi, dan juga belum maksimalnya keterlibatan Masyarakat dalam peningkatan kualitas informasi publik. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan layanan informasi yang lebih baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari beberapa aspek seperti kurangnya waktu atau lama penelitian yang mengakibatkan penelitian ini mayoritas lebih berfokus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek sehingga peneliti belum secara menyeluruh melakukan observasi di lokus lain seperti Lembaga pemerintah tertentu, desa, dan kecamatan. Selain itu keterbatasan juga terdapat pada anggaran yang sangat minim sehingga pelaksanaan observasi belum dilakukan secara maksimal. Terakhir penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada informan terutama Masyarakat yang diminta keterangan masih belum sepenuhnya memenuhi target.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan yang belum bisa ditentukan hasilnya. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat melihat kolaborasi dengan pihak akademisi dan juga media masa dimana pihak ini belum dilakukan observasi dalam penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa pikiran yang lapang sehingga penelitian ini mampu diselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Bapak dan Ibu yang memberikan Pendidikan karakter pertama dalam kehidupan, tidak lupa juga kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, seluruh dosen yang telah memberikan Pelajaran berharga sebagai bekal kehidupan, terkhusus kepada bapak Adfin Rochmad Baidhowah selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dalam penyelesaian penelitian ini. Terakhir ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada seluruh rekan rekan yang berjasa besar dalam kehidupan penulis sehingga mampu terus berjuang sampai titik ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Arman, M., & Rachmat, N. (2020). Implementasi Sistem Keamanan Web Server Menggunakan Pfsense. *Jusikom : Jurnal Sistem Komputer Musirawas*, 5(1), 13–23. <https://doi.org/10.32767/jusikom.v5i1.752>
- Baidhowah, A. (2022). Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks, and Constitution Amendment. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 97–109. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.97-109>
- Budianti, R., & Suliati, T. (2016). Analisis Kegiatan Evaluasi Layanan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 71–80.
- Creswell, J. W., & Angeles, L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Reserch*. 1–443.
- Febriananingsih, N. (2012). Public information disclosure in open government towards good governance. *Rechtsvinding*, 1(April), 135–156.

- Githa Girindra, I. A., Widnyani, I. A. P. S., & Utari Dewi, N. D. (2021). Optimalisasi Website Pemerintah Daerah Berbasis Collaborative Governance (Studi Pada Dinas Kota Malang). *Jurnal Widya Publika*, 9(1), 15–35. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.651>
- Kartiwi, K., Pitono, A., Arwanto, A., & Baidhowah, A. R. (2022). Inovasi Dan Pembangunan Desa Di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas Kesejahteraan Dan Kesetaraan Gender. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7, 59–81. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2219>
- Musthofa, A., Lukito, C., & Suhindarno, H. (2024). Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 58–68. <https://doi.org/10.56071/jian.v8i2.884>
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Rahmani, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5052>
- Schneider, J. P., Erny, J., & Enderlein, F. (2024). Collaborative Governance Structures for Interoperability in the EU's new data acts. *European Journal of Risk Regulation*, 24–35. <https://doi.org/10.1017/err.2024.46>
- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 17(3), 204. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Van Rooy, D. (2024). Human–machine collaboration for enhanced decision-making in governance. *Data and Policy*, 6. <https://doi.org/10.1017/dap.2024.72>
- Wijaya, A. B., Rakhmawati, D., Nurchandani, P. S., Rifai, Z., Hamdi, A., Christiana, F., & Suminar, R. (2022). Pendampingan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Lemburpurwo Dalam Optimalisasi Informasi Potensi Desa Melalui Media Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.36722/psn.v2i1.1423>
- Zakiah, R. U., Fadhillah, D. N., Gustina, R., Ratnasari, T., Hermawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan Kota Bogor (ASINAN BOGOR) Studi Kasus: Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3504–3511. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12423>

